

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menyeluruh. Tidak hanya di negara maju, negara berkembang pun mengalami kejadian serupa. Penemuan teknologi bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, selain itu teknologi yang maju juga membuat pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi berdampak di berbagai bidang antara lain bidang informasi, komunikasi, dan transaksi perekonomian.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam berinteraksi bahkan dengan penduduk negara lain. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang luas dari berbagai penjuru dunia. Dengan adanya berbagai kemudahan, masyarakat dapat mengambil hal positif dari perputaran arus informasi yang sangat cepat. Salah satu bentuk teknologi informasi digital yang sedang tren saat ini yaitu *e-commerce*. *E-commerce* memberikan akses kemudahan bagi pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi perdagangan.

Arus perdagangan yang semakin cepat harus diimbangi dengan sistem pembayaran yang juga efisien agar transaksi perdagangan tidak tersendat.

Terdapat banyak teknologi pembayaran yang telah ada digunakan oleh masyarakat antara lain kartu elektronik, dompet digital, cek digital, dan transfer antar rekening. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Munte (2017) peredaran kartu kredit yang ada di masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan tahun 2009-2014. Hal ini dikarenakan pembayaran non tunai akan mengurangi biaya transaksi sehingga kegiatan perputaran uang akan semakin cepat yang memicu peningkatan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan output. Peningkatan output akan berdampak positif pada Produk Domesti Bruto (PDB) dari suatu negara.

Menurut Warjiyo & Solikin (2003) peran sistem pembayaran non tunai akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karena semakin dominannya sistem transaksi bernilai besar daripada sistem transaksi bernilai kecil. Hal ini dikarenakan pembayaran non tunai memberikan rasa aman dan efisiensi yang lebih besar bagi penggunanya. Transaksi besar akan lebih berpengaruh pada perekonomian secara nasional dalam meningkatkan PDB suatu negara.

Dilansir Merdeka (2018) Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan *less cash society* (masyarakat non tunai), salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai menjadi digital. Menurut Bank Indonesia, transaksi non tunai dapat mencegah korupsi, pencucian uang (*money fund*), resiko pembiayaan terorisme dan lain-lain. Menurut data yang disajikan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

(2021) jumlah instrumen kartu pembayaran *non cash* tahun 2021 beserta ATM triwulan pertama sebesar 227 juta. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah bertransaksi memakai instrumen pembayaran *non cash*. Selain itu, data yang disajikan ASPI tahun 2021 juga menunjukkan terjadi peningkatan 1% jumlah *merchant* dari tahun 2020 sampai Maret 2021.

Melihat betapa pentingnya sistem pembayaran *non cash* serta telah maraknya masyarakat yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), pemerintah perlu hadir dan menguatkan kemajuan teknologi ini. Selain itu, belanja pemerintah mempunyai porsi cukup besar terhadap PDB yang artinya kebijakan pemerintah akan berdampak besar terhadap perekonomian. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bagian dari mekanisme pembayaran belanja pemerintah.

KKP merupakan bagian dari mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan, dimana uang persediaan merupakan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran terlebih dahulu untuk membiayai pengeluaran kegiatan operasional sehari-hari satker yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, KKP adalah instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu atas belanja yang dapat dibebankan ke APBN, dimana komitmen pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank, kemudian satker harus memenuhinya secara langsung pada waktu yang telah disepakati. Perbandingan Proporsi UP

Tunai dibanding UP KKP yaitu 60:40, dimana proporsi ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan satker.

Berdasarkan PMK 196/PMK.05/2018, kartu kredit pemerintah mulai dapat diterapkan satker pada 1 Juli 2019. Sebelum adanya ketentuan tersebut, kartu kredit pemerintah telah diuji coba terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Uji coba kartu kredit pemerintah dilaksanakan pada Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Instansi yang pertama kali mendapat kartu kredit pemerintah adalah KPPN cabang Tanjung Pandan pada 21 November 2019. Kartu kredit diterbitkan sebanyak 7 kartu yang dipegang oleh kepala kantor, 4 pejabat eselon III, bendahara, dan pejabat pengadaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Halim (2020) pada 2 satker mitra KPPN Magelang menunjukkan terdapat satker yang belum mengajukan kartu kredit pemerintah serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi satker dalam mengimplementasikan kartu kredit pemerintah antara lain komunikasi yang kurang jelas baik dari sosialisasi pemerintah maupun bank penerbit kartu kredit, kurangnya pemahaman pelaksana terkait implementasi kartu kredit pemerintah, dan masih terbatasnya mesin EDC pada rekanan satker.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait implementasi kartu kredit pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Pati dengan UP Tunai serta permasalahan yang dialami satker dalam pengimplementasian kartu kredit pemerintah. Hasil analisis tersebut akan penulis tuangkan dalam karya

tulis yang berjudul “Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah di Wilayah Pembayaran KPPN Pati”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Pati.
2. Bagaimana proporsi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di satker wilayah pembayaran KPPN Pati.
3. Apa saja permasalahan satker di wilayah pembayaran KPPN Pati dalam mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah.
4. Bagaimana hubungan antara realisasi penggunaan KKP dengan IKPA Pengelolaan UP & TUP.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan kartu kredit pemerintah di KPPN Pati.
2. Untuk mengetahui proporsi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di satker wilayah pembayaran KPPN Pati.
3. Untuk mengetahui permasalahan implementasi Kartu Kredi Pemerintah di satker wilayah pembayaran KPPN Pati.
4. Untuk mengetahui hubungan antara realisasi penggunaan KKP dengan IKPA Pengelolaan UP & TUP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah analisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah di satker wilayah pembayaran KPPN Pati. Data yang digunakan dalam kepenulisan meliputi nilai IKPA, realisasi penggunaan UP Tunai, realisasi penggunaan UP KKP, dan nominal besaran DIPA satker lingkup pembayaran KPPN Pati.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai cara untuk membangun pemahaman dan informasi terkait efektifitas dan permasalahan implementasi Kartu Kredit Pemerintah di wilayah pembayaran KPPN Pati.

1.5.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengetahui keadaan *real* di lapangan terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah serta sebagai wadah untuk lebih mengembangkan keterampilan menulis yang efektif dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada mata kuliah penatausahaan pembukuan bendahara.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait penatausahaan pembukuan bendahara.

c) Bagi Bendahara Pengeluaran

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi bendahara pengeluaran satker untuk menambah wawasan agar dapat mengimplementasikan kartu kredit pemerintah dengan lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari 4 bab dimana setiap bab nya terdiri dari subbab-subbab yang mempunyai urutan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum karya tulis tugas akhir mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan gambaran umum karya tulis tugas akhir mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan metode pengumpulan data, gambaran umum KPPN Pati, dan pembahasan hasil. Subbab pada BAB III adalah sebagai berikut :

a) Metode Pengumpulan Data

Menyajikan data yang dibutuhkan penulis, bagaimana penulis memperoleh data, dan bagaimana penulis mengolah data tersebut. Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu wawancara dan observasi.

b) Gambaran Umum

Menyajikan profil KPPN Pati, struktur organisasi, sejarah singkat, visi misi, dan tata kelola kartu kredit pemerintah.

c) Pembahasan Hasil

Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan *statistika inferensial uji rata-rata* dan *korelasi* untuk mengetahui efektifitas implementasi kartu kredit pemerintah. Selain itu, penulis juga mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari penggunaan kartu kredit pemerintah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas penjelasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang disampaikan penulis guna menjadi perbaikan implementasi di masa mendatang.